



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pencipta arsip perlu membuat pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
10. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
11. Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
12. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro dan apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi

lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

14. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
16. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari LKPP.
17. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar LKPP.
18. Tempat Penyimpanan Arsip Aktif yang selanjutnya disebut *Central File* adalah tempat yang dirancang untuk menyimpan Arsip Aktif secara efisien, efektif, dan aman.
19. Pusat Arsip yang selanjutnya disebut *Records Center* adalah suatu bangunan atau ruangan yang dirancang sebagai pusat penyimpanan dan pelayanan Arsip Inaktif.

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi Biasa/Umum/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola Arsip, serta daftar informasi Terbatas, dan Rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses Arsip, memuat Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP dimaksudkan untuk:

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis di unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di LKPP;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi LKPP yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan Lampiran Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan; dan
 - e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di LKPP.

Pasal 4

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di LKPP dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan

kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta prosedur operasional standar, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di LKPP dapat diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Umum/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. Arsip Dinamis di LKPP dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal;
- e. setiap Pengguna Internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; dan
- f. Pengguna Eksternal dapat mengakses informasi LKPP yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip

- Biasa/Umum/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
- b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, daftar Arsip inaktif, daftar aset, daftar Arsip terjaga dan daftar Arsip vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip harus merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama LKPP.

Pasal 8

- (1) Arsip Dinamis LKPP terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yang meliputi:
 - a. Biasa/Umum/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. Teknis pengamanan; dan
 - b. Pengaturan akses.

Pasal 9

Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Umum/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja antara lain:

- a. Arsip Dinamis dari Sekretariat Utama LKPP;
- b. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan yang meliputi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
- c. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi yang meliputi Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, dan Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang meliputi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi;
- e. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa meliputi Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
- f. Arsip Dinamis dari Inspektorat; dan
- g. Arsip Dinamis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di LKPP jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Pasal 11

Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas dan serius sehingga mengganggu kinerja LKPP.

Pasal 12

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/*Closed Circuit Television (CCTV)*, kunci pengaman ruangan, dan media simpan Arsip.
- (2) Pengamanan Arsip kategori Biasa/Umum/Terbuka disimpan pada rak besi, Arsip kategori Terbatas disimpan pada *filing cabinet*, dan Arsip kategori Rahasia disimpan pada lemari besi tahan api.

Pasal 13

- (1) Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Sekretariat Utama dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File*.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola Arsip inaktif berperan dalam Pengamanan Arsip di *Record Center* (Pusat Arsip).
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di *Central File*.

Pasal 14

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis di LKPP meliputi pembuatan daftar Arsip yang disusun dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai berikut:
 - a. daftar Arsip informasi publik dari Arsip Dinamis yang berkategori terbuka; dan
 - b. daftar Arsip Terbatas dan Rahasia, dari Arsip Dinamis yang berkategori tertutup.
- (2) Tujuan Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses yang

digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Record Centre* dan *Central File*.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif di LKPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 16

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris Utama dan Deputi;
 - c. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur;
 - d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Staf; dan
 - e. Pengawas Internal.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada di LKPP.
- (3) Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang:
 - a. mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya; dan
 - b. tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya.
- (4) Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengakses Arsip yang berada di luar kewenangannya, setelah mendapatkan izin dari Pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.

- (5) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka.
- (6) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang mengakses seluruh Arsip di LKPP dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf d, meliputi:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang mengakses seluruh Arsip di LKPP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengakses Arsip di LKPP yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengakses Arsip di LKPP yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1032

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan
Keuangan LKPP,




John Piter Halomoan

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

**KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE KLASIFIKASI	SERIES / JENIS DOKUMEN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP	KEPEGAWAIAN				
1	KP 01	Formasi Pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

	01.01	Usulan dari Unit Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	01.02	Usulan Permintaan Formasi Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara				Bagian Kepegawaian
	01.03	Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi				Bagian Kepegawaian
	01.04	Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara				Bagian Kepegawaian
	01.05	Penetapan Formasi Khusus				Bagian Kepegawaian
2	KP 02	Pengadaan Pegawai				
	02.01	Proses Penerimaan Pegawai meliputi: - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Tes	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

		<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Ujian Tertulis- Keputusan Hasil Ujian- Wawancara- Pengujian Kesehatan Akhir				
	02.02	Berkas lamaran yang tidak diterima	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	02.03	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) <ul style="list-style-type: none">- Surat Lamaran- Ijazah- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)- Kartu Kuning- Surat Keterangan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	02.04	Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) tahun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	02.05	Surat Keputusan CPNS PNS Kolektif	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Kepegawaian

					mengganggu kinerja LKPP	
3	KP 03	Pembinaan Karir Pegawai				
	03.01	Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin -Laporan Kegiatan Pengembangan Diri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	03.02	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	03.03	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	03.04	Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	03.05	Displin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

	03.06	Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	03.07	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
4	KP 04	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
5	KP 05	Mutasi Pegawai				
	05.01	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.02	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.03	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

	05.04	Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.05	Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.06	Usulan Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.07	Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.08	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
6	KP 06	Administrasi Pegawai				
	06.01	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

	06.02	Cuti Besar	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	06.03	Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	06.04	Cuti Alasan Penting	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	06.05	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	06.06	Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

	06.07	Berkas Pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
7	KP 07	Kesejahteraan Pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	07.01	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	07.02	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	07.03	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

8	KP 08	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
9	KP 09	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
10	KP 10	Usul pemberhentian dan penetapan pensiun Pegawai/Janda/Duda dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
11	KP 11	Berkas Perseorangan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
12	KP12	Berkas Perseorangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	KU	KEUANGAN				
	A	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

13	KU 01	Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
14	KU 02	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
15	KU 03	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
16	KU 04	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh LKPP	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
17	KU 05	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

	B	Pelaksanaan Anggaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
18	KU 01	Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
19	KU 02	Belanja				
	02.01	Surat Penyedia Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Persediaan (SPPTUP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPPGU)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	02.02	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan data dukung lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

	02.03	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	02.04	Daftar Gaji, Kartu Gaji, dan Keterangan Penghasilan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	02.05	Bukti Setor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	02.06	Laporan Kas Bendahara - Berita Acara Pemeriksaan - Kas/Register Penutupan Kas - Kuitansi Pembayaran dan Berita Acara Transfer - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara - Laporan Pendapatan - Laporan Keadaan Kredit Anggaran - Laporan Keadaan Kredit Anggaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

	02.07	Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	02.08	Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Realisasi Anggaran (RKA) - Neraca - Laporan Arus Kas (LAK) - Laporan Barang Milik Negara (BMN) - Laporan Realisasi Pendapatan Negara - Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	C	Bantuan/Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
20	KU 01	Bantuan/Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
21	KU.02	Bantuan/Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

	D	Penatausahaan Keuangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
22	KU 01	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
23	KU 02	Salinan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III		Bagian Keuangan
24	KU 03	Laporan Aparat Pemeriksaan Fungsional - Laporan Hasil Pemeriksaan - Memo Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut/Tanggapan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
25	KU 04	Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara - Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

	PL	PERLENGKAPAN				
26	PL 01	Rencana Kebutuhan Barang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	01.01	Rencana Kebutuhan Barang Unit Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	01.02	Rencana Kebutuhan Barang LKPP	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
27	PL 02	Pengadaan Barang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	02.01	Telaahan Pelaksanaan Lelang/Pemilikan/Penunjukan Langsung	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara

	02.02	Dokumen Lelang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
28	PL 03	Penyimpanan Barang dan Distribusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	03.01	Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	03.02	Pendistribusian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
29	PL 04	Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	04.01	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara

	04.02	Pembukuan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	04.03	Daftar Barang Ruangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	04.04	Inventarisasi Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
30	PL 05	Laporan Barang Milik Negara	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	05.01	Laporan Kondisi Barang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	05.02	Laporan Barang Kuasa Pengguna	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara

	05.03	Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal dan Internal	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	05.04	Laporan Persediaan Habis Pakai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	05.05	Laporan Persediaan Tidak Habis Pakai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	05.06	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	RT	RUMAH TANGGA				
31	RT 01	Administrasi Penggunaan/Langganan Daya dan Jasa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

32	RT 02	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
33	RT 03	Pemeliharaan Gedung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
34	RT 04	Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
35	RT 05	Administrasi Pengurusan Kendaraan Dinas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
36	RT 06	Pengelolaan Perparkiran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
37	RT 07	Administrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
38	RT 08	Ketertiban dan Keamanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT				
39	HM 01	Publikasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.01	Pameran	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.02	<i>Press Release</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.03	Publikasi lainnya	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
40	HM 02	Analisis Berita	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

41	HM 03	Rapat Dengar Pendapat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
42	HM 04	Hubungan Antar Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	04.01	Kementerian Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	04.02	Lembaga Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	04.03	Organisasi Pengadaan Nasional dan Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	04.04	Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	04.05	Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

	04.06	Perguruan Tinggi/Sekolah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	04.07	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
43	HM 05	Dokumentasi dan Penerbitan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
44	HM 06	Penghargaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
45	HM 07	Kenang-kenangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	07.01	Luar Negeri	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum dan Hubungan

					mengganggu kinerja LKPP	Masyarakat
	07.02	Dalam Negeri	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
46	HM 08	Verifikasi Helpdesk Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
47	HM 09	Penyediaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
48	HK	HUKUM				
	HK 01	Program Legalisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

	01.01	Bahan/Materi Program Legalisasi Nasional	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.02	Program Legalisasi Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
49	HK 02	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	02.01	Rancangan Undang - Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang - Naskah Akademik - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

	02.02	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, termasuk Naskah Akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
50	HK 03	Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
51	HK 04	Rancangan Keputusan /Ketetapan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
52	HK 05	Instruksi/Surat Edaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

	05.01	Instruksi/Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	05.02	Instruksi/Surat Edaran Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
53	HK 06	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk/Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional /Instansional - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

54	HK 07	Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	07.01	Nota Kesepahaman Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	07.02	Nota Kesepahaman Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
55	HK 08	Dokumentasi Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
56	HK 09	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	09.01	Berkas Berhubungan dengan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

	09.02	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
57	HK 10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
58	HK 11	Kasus/Sengketa Hukum	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	11.01	Pidana	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	11.02	Perdata	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

					penyelenggaraan pemerintahan	
	11.03	Tata Usaha Negara	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
59	OT 01	Struktur Organisasi Lembaga Kebijakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
60	OT 02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
61	OT 03	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
62	OT 04	Evaluasi Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

63	OT 05	Analisa Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
64	OT 06	Ketatalaksanaan - Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	PR	PERENCANAAN				
65	PR 01	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	01.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran

01.03	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.04	Rencana Strategis (Renstra)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.05	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.06	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.07	Revisi Dokumen Anggaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran

	01.08	Rencana Umum Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
66	PR 02	Program Kerja dan Anggaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	02.01	Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	02.02	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	02.03	Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
67	PR 03	Penetapan/Kontrak Kerja				

68	PR 04	Laporan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	04.01	Laporan Berkala, yang terdiri dari : - Laporan Harian - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan - Laporan Triwulanan - Laporan Semesteran - Laporan Tahunan Unit Kerja - Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	04.02	Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	04.03	Laporan Insidental - Peta Unit Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa - Laporan Konsultan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

69	PR 05	Evaluasi Program	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	05.01	Evaluasi Program Unit Kerja			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	05.02	Evaluasi Program LKPP			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	PW	PENGAWASAN				
70	PW 01	Manajemen Pengawasan				
	01.01	Rencana Strategis Inspektorat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.02	Penyusunan Prosedur dan Pedoman	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.03	Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat

	01.04	Pengelolaan Teknologi Informasi Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.05	Pengelolaan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.06	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.07	Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.08	Hasil Manajemen Pengawasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
71	PW 02	Pelaksanaan Pengawasan				
	01.01	Audit	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat

	01.02	<i>Review</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.03	Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.04	Pemantauan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.05	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.06	Pengaduan Masyarakat	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.07	<i>Whistleblowing System (WBS) Internal</i>	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	TU	TATA USAHA				
	A	Persuratan				

72	TU 01	Administrasi Persuratan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	B	Kearsipan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
73	TU 01	Pemeliharaan Arsip - Pemberkasan Arsip Aktif/Vital - Penataan Arsip Inaktif - Penyimpanan dan Alih Media Arsip	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
74	TU 02	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
75	TU 03	Layanan Arsip				
	04.01	Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	04.02	Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga

	04.03	Penyerahan Arsip Statis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
76	TU 05	Pembinaan Kearsipan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	C	Keprotokolan				
77	TU 01	Rapat/Rapat Koordinasi /Rapat Koordinasi Teknis	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
78	TU 02	Acara Keprotokolan				
	02.01	Upacara/Acara Kedinasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	02.02	Kunjungan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga

	02.03	Agenda Pimpinan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	02.04	Perjalanan Dinas Pimpinan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
79	PT	PERPUSTAKAAN				
	PT 01	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.01	Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.02	Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

80	PT 02	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.01	Buku Induk Koleksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.02	Daftar Buku Terseleksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.03	Daftar Buku Dalam Pesanan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.04	Daftar Buku Dalam Permintaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

02.05	Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah, Deposit, dan Hibah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.06	Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.07	Lembar Kerja Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.08	Jaringan Kartu Utama	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.09	Daftar Tambahan Buku (<i>Assesion List</i>)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

	02.10	Daftar/Jaringan Kendali (Subyek dan Pengarang)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
81	PT 03	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.01	Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.02	Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
82	PT 04	Preservasi Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

	04.01	Survei Kondisi Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	04.02	Reprografi Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
83	TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LKPP				
	TI 01	Pengembangan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.01	Perencanaan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.02	Analisis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.03	Rancangan Desain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

	01.04	Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.05	Pengujian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.06	Implementasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.07	Panduan Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
84	TI 02	Pengelolaan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.01	Permintaan Perubahan Aplikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.02	Pemeliharaan Aplikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

85	TI 03	Data dan Informasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.01	Koleksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.02	Pemeliharaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.03	Statistik	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
86	TI 04	Pengembangan dan Pengamanan Jaringan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

	04.01	Pengembangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	04.02	Layanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
87	TI 05	Dokumen <i>Hosting</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
88	TI 06	Layanan <i>Back-up Data Digital</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
89	TI 07	Dokumentasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP				
	07.01	Verifikasi Penyedia	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	07.02	Permohonan <i>Admin Agency</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

	07.03	Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
--	-------	---	------------------------	------------	--	-------------------------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

**KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE KLASIFI KASI	SERIES / JENIS DOKUMEN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTER NAL	EKSTERNAL		
	PU	DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM					
1	PU.01	Pengkajian Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

							Pengadaan Umum
01.01	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Kajian/Memo Kebijakan/ <i>Policy Brief</i> - Notula Penyusunan Kajian - Identifikasi Peraturan - Identifikasi <i>Best Practice</i> - Data Dukung/ <i>Evidence</i> - Hasil Survei/Kuesioner Laporan Pendahuluan/Antara/Final Konsultan	Terbatas	Eselon II				Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
01.02	Peningkatan Partisipasi UMKM - Kajian/Memo Kebijakan/ <i>Policy Brief</i> - Notula Penyusunan Kajian - Identifikasi Peraturan - Identifikasi <i>Best Practice</i> - Data Dukung/ <i>Evidence</i> - Hasil Survei/Kuesioner Laporan Pendahuluan/Antara/Final Konsultan	Terbatas	Eselon II				Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

01.03	<p>Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kajian/Memo Kebijakan/<i>Policy Brief</i>- Notula Penyusunan Kajian- Identifikasi Peraturan- Identifikasi <i>Best Practice</i>- Data Dukung/<i>Evidence</i>- Hasil Survei/Kuesioner Laporan Pendahuluan/Antara/Final Konsultan	Terbatas	Eselon II			Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
01.04	<p>Kajian Pendukung Penyusunan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kajian/Memo Kebijakan/<i>Policy Brief</i>- Notula Penyusunan Kajian- Identifikasi Peraturan- Identifikasi <i>Best Practice</i>- Data Dukung/<i>Evidence</i>- Hasil Survei/Kuesioner Laporan Pendahuluan/Antara/Final Konsultan	Terbatas	Eselon II			Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

2	PU 02	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi Regulasi- Notula Penyusunan Kebijakan- Draf/Rancangan Kebijakan (Peraturan Presiden/Peraturan LKPP/Keputusan Deputi/Surat Edaran)- Surat- Rekomendasi/Usulan/Masukan/Tanggapan- Rapat antar Kementerian- Finalisasi Kebijakan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3	PU 03	Diseminasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

	03.01	Bahan Paparan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Umum	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	03.02	Video Diseminasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	PU 04	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	04.01	- Hasil Survei/Kuesioner - Daftar Inventaris Masalah - Rekomendasi Kebijakan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan

		- Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi - Laporan Pendahuluan, Antara dan Final Konsultan - Bahan Paparan Konsultan					Kebijakan Pengadaan Umum
	PU 05	Penafsiran Peraturan Perundang-undangan					
	05.01	Layanan Penafsiran Peraturan di bidang Pengadaan Barang/Jasa - Surat Permintaan Penafsiran - Rancangan Tanggapan Permintaan Penafsiran - Surat Tanggapan Permintaan Penafsiran	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	KK	PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS					
4	KK 01	Penyusunan Kebijakan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus

01.01	Penyusunan Peraturan tentang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
01.02	<i>Output</i> Kebijakan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
01.03	Kajian Dampak Implementasi Peraturan tentang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
01.04	<i>Piloting</i> Peraturan tentang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus

5	KK 02	Kajian/Pedoman Pengadaan Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
	02.01	- Inventarisasi Permasalahan atau Isu - Pembahasan Permasalahan atau Isu - Penyusunan Laporan - Finalisasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6	KK 03	Kajian/Pedoman Badan Usaha	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	03.01	- Inventarisasi Permasalahan atau Isu - Pembahasan Permasalahan atau Isu - Penyusunan Laporan - Finalisasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

							Pengadaan Khusus
7	KK 04	Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	04.01	- Penelaahan Permohonan Pendampingan - Pelaksanaan Pendampingan - Penyusunan Laporan Pendampingan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8	KK 05	Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Pengumpulan Bahan dan Informasi - Perumusan Model Dokumen Pengadaan - Finalisasi Model Dokumen Pengadaan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

9	KK 06	Survei - Persiapan Survei - Penyusunan Kuesioner - Pembuatan Laporan Survei - Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
10	KK 07	Sosialisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	07.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Standar dan Pedoman Teknis - Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - Evaluasi dan Pembuatan Laporan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
11	IU	PENGEMBANGAN IKLIM USAHA					

	IU 01	Rumusan Strategi dan Kebijakan					
	01.01	Kajian - Pengembangan Pelaku Usaha - Perluasan Kesempatan Usaha	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	01.02	<i>Roadmap/Business Process</i> - Pengembangan Pelaku Usaha - Perluasan Kesempatan Usaha	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
12	IU 02	Rumusan Pedoman	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	02.01	<i>Policy Brief</i> - Pengembangan Pelaku Usaha - Perluasan Kesempatan Usaha	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

13	IU 03	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Diseminasi					
	03.01	Sosialisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	03.02	Kuliah Umum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	03.03	Bimbingan Teknis/ <i>Capacity Building</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	03.04	Seminar	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan

							Kerjasama Internasional
	03.05	Diseminasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
14	IU 04	<i>Sustainable Public Procurement</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
15	IU 05	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
16	IU 06	Usaha Mikro Kecil Menengah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

							Kerjasama Internasional
17	IU 07	Umum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
18	KI	PENGEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL					
	KI 01	Multilateral					
	01.01	Pengembangan Kerjasama Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Inventarisasi Masalah - Sosialisasi Hasil Kegiatan Harmonisasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	01.02	Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Persiapan Negosiasi Kerjasama Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

	01.03	- Pelaksanaan - Finalisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	01.04	Peningkatan Hubungan Internasional - Inventarisasi Masalah - Keikutsertaan dalam Forum Internasional - Penyusunan Laporan Hasil	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
19	KI 02	Bilateral					
	02.01	Pengembangan Kerjasama Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Inventarisasi Masalah - Sosialisasi Hasil Kegiatan Harmonisasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	02.02	Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan

		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Negosiasi Kerjasama Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Pelaksanaan - Finalisasi 					Kerjasama Internasional
	02.03	Peningkatan Hubungan Internasional <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi masalah - Keikutsertaan dalam Forum Internasional - Penyusunan Laporan Hasil 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
20	KI 03	Kajian Pengembangan Kerjasama Internasional					
	03.01	Multilateral	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	03.02	Bilateral	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan

							Kerjasama Internasional
21	KI 04	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Diseminasi					
	04.01	Bimbingan Teknis/ <i>Capacity Building</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	04.02	Sosialisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	04.03	Seminar	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

	04.04	Diseminasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
22	KI 05	Umum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
23	PP	PERENCANAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH					
	PP 01	Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi					
	01.01	Penyusunan Pedoman Rencana Umum Pengadaan - Inventarisasi Masalah/Kajian dan Harmonisasi Peraturan - Pembahasan Draf - <i>Public Hearing</i> - Finalisasi - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan

	01.02	Pengembangan Aplikasi Rencana Umum Pengadaan - Inventarisasi Masalah/Kajian - <i>Testing</i> Aplikasi - Integrasi - Finalisasi - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan	
	01.03	Sosialisasi - Sosialisasi Pedoman Rencana Umum Pengadaan - Sosialisasi Aplikasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan	
24	ME	MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN						
	ME 01	Pengembangan Sistem / Aplikasi <i>Monitoring</i> Pengadaan Barang/Jasa						
	01.01	Pengembangan Aplikasi <i>Monitoring</i> Pengadaan Barang/Jasa - Inventarisasi Masalah/Kajian - <i>Testing</i> Aplikasi - Integrasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan	

		- Finalisasi - Laporan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
25	ME.02	Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa					
	02.01	Penyusunan Alat Pengukuran Kinerja Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
	02.02	Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
	02.03	Pelaporan Evaluasi Kinerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan

							Evaluasi Pengadaan	
26	ME 03	Administrasi Penayangan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa						
	03.01	<i>Check List</i> Penayangan Daftar Hitam	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan	
	03.02	Penurunan Daftar Hitam	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan	
	03.03	Pengembangan Sistem Administrasi Daftar Hitam - Inventarisasi Masalah/Kajian - <i>Testing</i> aplikasi - Integrasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan	

		- Finalisasi - Laporan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
27	ME 04	Sosialisasi Sistem <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
28	ME 05	Penyusunan Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
29	RK	RISET DAN KONTRAK					
	RK 01	Riset Pasar dan Industri					
	01.01	Analisis Hasil Riset Pasar/Industri Barang Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Usulan Barang/Jasa dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi/Penyedia - Surat Jawaban Usulan Barang/Jasa kepada Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi/Penyedia - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula) - Laporan Analisis Hasil Riset Pasar/Industri Barang Jasa 					
	01.02	Pembuatan Dokumen Surat Tugas Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Katalog <ul style="list-style-type: none"> - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula) - Surat Tugas Penunjukan Kelompok Kerja Katalog 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
30	RK 02	Kontrak Katalog					

02.01	- Berkas Rapat - Surat Usulan Barang/Jasa dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Penyedia	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
	- Dokumen pemilihan penyedia - Surat Undangan pemasukan penawaran kepada Penyedia Barang/Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
	- Nota Dinas Penayangan Pengumuman	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.02	Pemilihan Penyedia Melalui Non Lelang/Negosiasi - Dokumen Penawaran Penyedia - Berkas Rapat - Berita Acara - Nota Dinas - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.03	Pemilihan Penyedia Melalui Lelang - Dokumen Penawaran Penyedia - Berkas Rapat	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

		<ul style="list-style-type: none">- Berita Acara- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa- Nota Dinas- Laporan					
02.04	Pembuatan Pedoman Kontrak Katalog	<ul style="list-style-type: none">- Berkas Rapat- Pedoman Kontrak Katalog- Nota Dinas- Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.05	Pembuatan Kebijakan Sistem Katalog Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- Berkas Rapat- Pedoman Kebijakan Sistem Katalog Elektronik- Nota Dinas- Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.06	Pembuatan Pedoman Tata Cara Pemilihan Penyedia	<ul style="list-style-type: none">- Berkas Rapat- Pedoman Tata Cara Pemilihan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

		Penyedia - Nota Dinas - Laporan					
	02.07	Pelaksanaan Kontrak Payung - Berita Acara - Berkas Rapat - Dokumen Kontrak Katalog - Dokumen Surat Keputusan (SK) Penetapan - Nota Dinas - Bukti Pengambilan Kontrak Katalog dan SK Penetapan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
31	PK	PENGELOLAAN KATALOG					
	PK 01	Pengendalian Pengawasan Katalog					
	01.01	Pengelolaan Aplikasi - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula) - Laporan Proses Bisnis aplikasi e- <i>Katalog</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

	01.02	<p>Pengelolaan Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Penurunan/ <i>Update</i>/Pembatalan Paket Produk Barang/Jasa dari Penyedia - Surat Pengaduan/Saran/Masukan - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula) - Berita Acara - Surat Peringatan - Surat Tanggapan - Laporan 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
	01.03	<p>Pelatihan dan/atau Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula) Pelatihan Input Data ke Aplikasi - Materi Pelatihan/Sosialisasi - Laporan 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
32	PK 02	Evaluasi Katalog					
	02.01	<p>Pembuatan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Katalog</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas Rapat 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

		<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Pengelolaan Katalog - Nota Dinas - Laporan 					
02.02	<p><i>Monitoring dan Evaluasi e-Katalog</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Data - Laporan Jumlah Produk/Penyedia - Laporan Survei Kesesuaian (Harga, Produk, Profil Penyedia) - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula) - Berita Acara - Surat Peringatan - Laporan Hasil Evaluasi 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	
02.03	<p><i>Monitoring dan Evaluasi Transaksi e-Purchasing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Data - Surat Aduan - Berita Acara - Nota Dinas - Laporan Transaksi Penyedia Kementerian/Lembaga/Daerah/ 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	

		Instansi Per Komoditas					
33	PA	PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)					
	PA 01	Pengembangan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)					
	01.01	Inventarisasi Nama-nama Aplikasi - Daftar Fitur Aplikasi - Petunjuk Penggunaan - Daftar Nama-Nama Tabel - <i>Scenario Testing</i> - <i>Database Diagram</i> - <i>Activity Diagram</i> - <i>Class Diagram</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	01.02	Uji Coba Aplikasi - <i>Release Update</i> - <i>Release Aplikasi</i> - <i>Release Upgrade</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	01.03	Pengadaan Konsultan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem

							Pengadaan Secara Elektronik
	01.04	Penyusunan <i>IT Plan</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	01.05	Penyempurnaan dan Finalisasi - <i>Expose</i> - <i>Scenario Testing</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
34	PA 02	Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)					
	02.01	Pemeliharaan Aplikasi - Pusat - Daerah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan

							Secara Elektronik
02.02	Infrastruktur	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
	Teknis (<i>Server</i>)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
	Non Teknis (Kebijakan, <i>Advice</i> , Regulasi)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	

	02.03	<i>Monitoring</i> - <i>Security</i> - <i>Back-up Data</i> - <i>Cloud</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	02.04	Pelayanan Aplikasi - Rutin (Identifikasi Forensik) - Reguler (Pengaduan Kecurangan Pengadaan)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
35	PA 03	Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)					
	03.01	Bimbingan Teknis Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

	03.02	Manajemen Teknik Reguler - Sistem Pengadaan Secara Elektronik - Regulasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		- Aplikasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	03.03	Manajemen <i>Technics Admin</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

	03.04	<i>Call Center</i> LPSE Nasional	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	03.05	<i>Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional</i> - Persiapan Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi - <i>Training International Organization for Standardization (ISO)</i> - Konsultasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Pembinaan - Regulasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		- Aplikasi <i>e-Proc.lkpp.id</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan

							Secara Elektronik
36	PA 04	Penyedia Terkualifikasi					
	04.01	<i>Media Campaign</i> Penyedia	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	04.02	Pembinaan Penyedia	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	SK	STANDAR KOMPETENSI DAN KELEMBAGAAN					
37	SK 01	Standar Kompetensi					
	01.01	Diseminasi dan Pemantauan Implementasi Standar Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

		Pemerintah (PBJP) - Peta Unit Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) - Laporan Konsultan - Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan					
38	SK 02	Kelembagaan Pengadaan					
	02.01	Pengembangan Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP) - Laporan Konsultan Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan - Draf sampai dengan Finalisasi Buku Panduan Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan - Dokumen Uji Coba Aplikasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	02.02	Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

		- Laporan Kegiatan dan Dokumentasi					
	02.03	Pembinaan Unit Layanan Pengadaan - Peraturan/Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan - SK Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan - Laporan Hasil PengadaanBarang/ Jasa Unit Layanan Pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan - Buku Kajian Akademis Unit Layanan Pengadaan - Formulir Konsultasi Unit Layanan Pengadaan - File <i>Customer Relationship Management (CRM)</i> Data Persebaran Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

	- Laporan Konsultan					
02.04	Kajian Akademis Pembentukan Unit Layanan Pengadaan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.05	Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.06	Sosialisasi - Hasil Pengisian <i>Self Assesment</i> dan <i>Road Map</i> Unit Layanan Pengadaan - Buku <i>Maturity</i> Unit Layanan Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.07	Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) - Modul Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan - Laporan Konsultan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

02.08	Fasilitas Program Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan Dalam Rangka Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Yang Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.09	Pemilihan Unit Layanan Pengadaan Percontohan Fase II - <i>Memorandum of Understanding</i> Unit Layanan Pengadaan Percontohan - Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan ULP	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.10	<i>Review</i> Modul	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.11	Pendampingan Pengawasan <i>Mentoring</i> dan ULP Percontohan (Laporan)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

	02.12	<i>Capacity Building</i> - Laporan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Kompetensi dan Kelembagaan
	PG	PENGEMBANGAN PENGELOLA PENGADAAN					
39	PG 01	Karir Pengelola Pengadaan					
	01.01	Perumusan Kebijakan - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Peraturan Kepala - Surat Edaran - Naskah Akademik - Analisa Beban Kerja - Notula Rapat	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	01.02	Forum Komunikasi Jabatan Fungsional - Notula Hasil Forum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

	01.03	Penilaian Angka Kredit - Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) - Surat Penyampaian Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) - Notula Rapat Pleno	Terbatas	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	01.04	Peningkatan Kapasitas Tim Penilai - Hasil <i>Workshop</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
40	PG 02	Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan					
	02.01	<i>Database</i> Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa - Rencana Kebutuhan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa - Persebaran Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	02.02	Sistem Informasi Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

	- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tenaga Ahli	Biasa/Umum/ Terbuka		Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	- Laporan Tenaga Ahli	Terbatas			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	- Panduan Pengguna	Biasa/Umum/ Terbuka		Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.03	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (PFPPBJ)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	- Pedoman dan Instrumen <i>Monitoring</i> Evaluasi - Lembar <i>Monitoring</i> - Lembar Kuesioner - Lembar Interview	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

		- Hasil dan Rekomendasi <i>Monitoring</i> Evaluasi					
	SF	SISTEM DAN SARANA SERTIFIKASI					
41	SF 01	Sistem Sertifikasi					
	01.01	Dokumen Kebijakan meliputi Peraturan, Keputusan, Panduan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
42	SF 02	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen					
	02.01	<i>International Standardization Organization (ISO) 9001:2015</i> - Panduan dan pedoman - Standar Operasional Prosedur (SOP) - Instruksi Kerja - Formulir	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

	02.02	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKPP Berdasarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - Panduan dan Pedoman - Standar Operasional Prosedur (SOP) - Skema Sertifikasi Kompetensi - Instruksi Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	02.03	- <i>Log Book</i> Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan - Kuesioner Konsultasi Kepuasan Pelanggan	Terbatas	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
43	SF 03	Sarana Sertifikasi					
	03.01	Penyusunan Materi Uji Kompetensi dan Bank Soal	Rahasia	Eselon II (UKE II Terkait)		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
	03.02	Penyelenggaraan Peralatan Operasional Sertifikasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

	03.03	- Data dan Hasil Analisa Psikometri - Riwayat Analisa Butir Soal - Laporan Analisa Butir Soal	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
44	SF 04	Daftar Sarana dan Prasarana					
	04.01	Daftar Inventarisasi Sarana Habis Pakai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	04.02	Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	04.03	Berita Acara Penyerahan Daftar Barang Milik Negara	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	04.04	Daftar Pemeliharaan Sarana	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

	04.05	<i>Check List Monitoring</i> Prasarana	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	04.06	Formulir <i>Monitoring</i> Sarana Laboratorium Komputer	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
45	SF 05	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen					
	05.01	Dokumen Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	05.02	Dokumen Teknis Aplikasi Sertifikasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	05.03	<i>Database</i> Sertifikasi termasuk <i>Back up</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
46	SF 06	Pembentukan dan Pembinaan Tempat Uji Kompetensi (TUK)					

	06.01	Dokumen Permohonan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	06.02	Hasil Verifikasi (<i>Check List</i> Verifikasi TUK dan Berita Acara TUK)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	06.03	Data Pengawas Ujian dan TUK	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	06.04	Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
47	SF 07	Pembentukan dan Pembinaan Asesor Kompetensi					
	07.01	Riwayat Penugasan Asesor	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
48	SF 08	Tata Kelola Sertifikasi					

	08.01	Dokumen Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) - Surat Permohonan Penyelenggaraan Ujian - Surat Tugas Pengawas - Berita Acara Pengawasan Ujian - Dokumen Pertanggungjawaban Pengawasan Ujian - Daftar Hadir Peserta - Daftar Foto Peserta - Salinan Sertifikat - Dokumen Pendukung Lainnya	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP dan instansi	Direktorat Sertifikasi Profesi
		- Jadwal Penyelenggaraan Ujian	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	08.02	Dokumen Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Berbasis Kompetensi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Penyelenggaraan Ujian - Surat Tugas Asesor - Berita Acara Hasil Ujian Kompetensi - Dokumen Pertanggungjawaban Hasil Uji Kompetensi - Daftar Hadir Peserta - Daftar Foto Peserta - Salinan Sertifikat - Formulir Pelaksanaan Ujian Kompetensi - Dokumen Pendukung Lainnya 					
		Jadwal Penyelenggaraan Ujian	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
49	SF 09	Dokumen Evaluasi					
	09.01	Kuesioner <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Ujian	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

	09.02	Berita Acara <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawas Ujian (Audit)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	09.03	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Ujian	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	09.04	Rekapitulasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Ujian	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	09.05	Jadwal Pengawasan Evaluasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	09.06	Laporan Semester, Triwulan, dan Tahunan Evaluasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
50	SF 10	Dokumen Surveilen					
	10.01	Jadwal Pengawasan Surveilen	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

	10.02	Formulir Surveilen dan Dokumen Pendukung Lainnya	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	10.03	Berita Acara Hasil Surveilen	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	10.04	Laporan/ <i>Feedback</i> Asesi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	10.05	Laporan Instansi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	10.06	Laporan Semesteran dan Tahunan Surveilen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	HS	HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH					
51	HS 01	Pemberian Advokasi					
	01.01	Pemberian <i>Advice</i> terkait Pengadaan Barang Jasa	Terbatas	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah

							Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
01.02	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via Surat	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	
01.03	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via <i>Web</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	

	01.04	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via <i>Call Center</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
	01.05	Bimbingan Teknis	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
52	HS 02	Penyelesaian Sanggah dan Pengaduan					
	02.01	Pemberian <i>advice</i> terkait Pengadaan Barang Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah

							Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
02.02	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via Surat	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	
02.03	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via <i>Web</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	

53	HS 03	Pendampingan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
54	HS 04	Kemitraan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah					
	04.01	Bimbingan Teknis	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	04.02	Pelatihan Peningkatan Kompetensi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	04.03	<i>Probity Advising</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
55	HS 05	Peningkatan Partisipasi Stakeholder					

	05.01	Seminar	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	05.02	<i>Workshop</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	05.03	<i>Forum Group Discussion (FGD)</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	05.04	Kompetisi Aplikasi Elektronik	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
56	HS 06	Pengembangan Sistem Pelayanan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

57	HS 07	<i>Procurement Knowledge Management</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
58	HS 08	Konsolidasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
59	HS 09	Penanganan Permasalahan Hukum	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	09.01	Permohonan Layanan Keterangan Ahli - Berita Acara Pemeriksaan - Gelar Perkara - Laporan Persidangan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	09.02	Penugasan Ahli	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

09.03	Layanan Keterangan Ahli	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
09.04	<i>Monitoring</i> Evaluasi Layanan Keterangan Ahli	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
09.05	Seleksi Pemberi Keterangan Ahli - Pengumuman - Pendaftaran - Pengawasan Seleksi - Penilaian Hasil Seleksi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
09.06	Peningkatan Kapasitas Ahli - Undangan - Pendaftaran - Pengawasan Peningkatan Kapasitas - Penilaian Hasil Peningkatan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
09.07	Penyamaan Persepsi dengan Aparat Penegak Hukum - Undangan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan

		- Konfirmasi - Pengawasan - Pelaporan					Permasalahan Hukum
	09.08	Pengembangan Aplikasi Layanan Keterangan Ahli	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
60	HS 10	Penanganan Permasalahan Kontrak					
	10.01	Konsultasi Permasalahan Kontrak - Permintaan Konsultasi - Pemberian Tanggapan Konsultasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	10.02	Peningkatan Kapasitas Biro Hukum - Pengumuman dan Undangan - Pengawasan - Pelaporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	10.03	Peningkatan Kapasitas Internal - Undangan - Pengawasan - Pelaporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

	10.04	<i>Monitoring</i> Penanganan Permasalahan Kontrak - Survei Peningkatan Kapasitas Biro Hukum - <i>Monitoring</i> Pengawasan Kegiatan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
61	HS 11	Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
62	HS 12	Layanan Penyelesaian Sengketa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	DL	PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA LKPP					
63	DL 01	Materi Pelatihan					
	01.01	Penyusunan Materi Pelatihan Keahlian PBJP - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ Slide (<i>softcopy</i>)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

		- Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)					
01.02	Penyusunan Materi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	- Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide (softcopy)</i> - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

01.03	Penyusunan Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Pertama - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide</i> (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
01.04	Penyusunan Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Muda - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide</i> (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul,	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

		Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)					
01.05	Penyusunan Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Madya - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide (softcopy)</i> - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	
01.06	Penyusunan Materi Pelatihan <i>Training of Trainer (ToT)</i> - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide (softcopy)</i> - Dokumen pendukung lainnya (Daftar	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	

		Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)					
01.07	Penyusunan Materi Pelatihan <i>Management of Training (MoT)</i> - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide (softcopy)</i> - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	
01.08	Penyusunan Materi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Hukum PBJP - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide (softcopy)</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	

		- Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)					
01.09	Penyusunan Materi Pelatihan Manajemen Resiko dalam Pekerjaan Konstruksi	- Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide (softcopy)</i> - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
01.11	Penyusunan Materi Pelatihan Berdasarkan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2016	- Kurikulum	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / Slide (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i>, dan lain-lain) 					
01.12	<p>Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Notula - Daftar Hadir Peserta - Bahan Ajar Konsultan - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i>, dan lain-lain) 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	

01.13	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2016 - Silabus - Kurikulum - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
01.14	Penyusunan Materi Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar (<i>softcopy</i>) - Pedoman Pelatihan (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

		Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)					
01.15	Penyusunan Materi Pelatihan Desa, (Buku Informasi, Buku Kerja, dan Slide Bahan Ajar) - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ Slide (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	
01.16	Penyusunan Materi "Revisi Materi Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Kurikulum	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	

		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar/ <i>Slide</i> (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain.)					
	01.17	Penyusunan Materi Pelatihan <i>e-Learning</i> <ul style="list-style-type: none"> - Materi Pembelajaran 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
64	DL 02	Informasi Materi Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> - Brosur - Buklet - <i>Leaflet</i> 	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
65	DL 03	Evaluasi Pelatihan					
	03.01	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelatihan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

	03.02	Perencanaan Penyusunan Pedoman - Undangan - Daftar Hadir - Notula - Paparan Konsultan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	03.03	Pedoman <i>Monitoring</i> Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa - Formulir <i>Monitoring</i> - Rekapitulasi Data Hasil <i>Monitoring</i> dan Analisa Data <i>Monitoring</i> - Laporan Hasil Evaluasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	03.04	Pedoman <i>Monitoring</i> Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa - Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Pertama - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

		<p>Muda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Madya - Formulir <i>Monitoring</i>, Rekap Data, Hasil <i>Monitoring</i> dan Analisa Data <i>Monitoring</i>, serta Laporan Hasil Evaluasi 					
03.05	<p>Penyusunan Evaluasi Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir Evaluasi Pelatihan - Rekapitulasi Data Hasil Evaluasi dan Analisa Data Evaluasi - Laporan Hasil Evaluasi 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	
03.06	<p>Pedoman Evaluasi Pelatihan Keahlian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	

		<p>Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Muda - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Madya - Formulir <i>Monitoring</i>, Rekap Data, Hasil <i>Monitoring</i> dan Analisa Data <i>Monitoring</i>, serta Laporan Hasil Evaluasi 					
	03.07	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
66	DL 04	Kajian					
	04.01	<p>Kajian Efektivitas Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Laporan Kegiatan 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

	04.02	Kajian Urgensi Pembentukan Pusdiklat - Naskah Akademik - Sosialisasi - Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
67	DL 05	Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pelatihan Kompetensi - Manual Mutu - Manual Manajemen Risiko - Standar Operasional Prosedur - Hasil Internal Audit <i>International Standardization Organization (ISO) 9001:2015</i> - Hasil Tinjauan Manajemen	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
68	DL 06	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pembelajaran					
	06.01	Sistem <i>e-Learning</i> - Undangan Narasumber - Paparan Konsultan - Notula Rapat - Daftar Hadir	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

	06.02	Sistem Informasi Pelatihan (SIMPEL) - Undangan Narasumber - Paparan Konsultan - Notula Rapat - Daftar Hadir	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	06.03	Sistem <i>Learning Resource Center (LRC)</i> - Regulasi - Modul Elektronik - Undangan Narasumber - Daftar Hadir	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
69	DL 07	Data Sistem Informasi Pelatihan - Data Lembaga Penyelenggara Pelatihan - Data Narasumber/Pengajar - Jadwal Pelatihan - Data Program Pelatihan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
70	DL 08	Lembaga Pelatihan					
	08.01	Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Re-Akreditasi, Surveilen) - Surat Permintaan Akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi Kegiatan Akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan - Surat Jawaban Permintaan Akreditasi - Surat Tugas - Instrumen Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan - Fotokopi Surat Keputusan Akreditasi 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara dan <i>Check List</i> Asesmen Pendahuluan - Berita Acara dan <i>Check List</i> Asesmen Lapangan - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Akreditasi 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	08.02	Data Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
71	DL 09	Kerjasama Lembaga					

	09.01	<p><i>Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama LKPP dan Instansi lainnya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Lembaga - Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama Lembaga - Laporan Kegiatan/Rapat/Perjalanan - Surat Permintaan Kerjasama - Surat Jawaban Permintaan Kerjasama - Notula Rapat Kerjasama 	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
72	DL 10	Pengajar Pengadaan					
	10.01	<p>Pengajar Pelatihan</p> <p>Meliputi Dokumentasi Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran - Panduan -Kerangka Acuan Kerja 	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	10.02	<p>Penyelenggaraan Pelatihan untuk Pengajar/Narasumber</p>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat umum)	Tidak memiliki dampak yang	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

						mengganggu kinerja LKPP	
		- Laporan Penyelenggaraan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		- Soal Ujian <i>Training of Trainer</i>	Terbatas			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10.03	Pengawasan Pengembangan Narasumber - Laporan Penyelenggaraan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	
10.04	Fasilitasi Pelatihan - Surat Permohonan Narasumber - Surat Jawaban Fasilitasi - Jadwal Pelatihan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	
	- Surat Tugas Pengajar	Terbatas			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	

10.05	Data Pengajar Pengadaan Barang/Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10.06	Data Pengajar <i>Training of Trainer</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10.07	Konsultasi Pelatihan - Formulir Konsultasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO